

# Pembentukan Dinas Penyelaman Angkatan Laut Republik Indonesia Pasca Konferensi Meja Bundar, 1949-1952

**SATRIO DWICAHYO**

Department of History, Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
Institute For History, Leiden University, Netherlands  
Email: [satrio.dwicahyo@mail.ugm.ac.id](mailto:satrio.dwicahyo@mail.ugm.ac.id)

## Abstract

This article examines the establishment of the Indonesian Navy diving service took place as one of the consequences of the Round Table Conference, through the lens of postcolonial technoscience. As a moment of political transition, the conference created a space for negotiation between the Netherlands and the United States of Indonesia in determining the development of a newly recognized republic. One form of this negotiation was granting permission for the Royal Netherlands Navy to carry out an assistance program for the navy of the United States of Indonesia, which included support in forming a diving service. This assistance program became a context in which postcolonial dialogues emerged concerning the use of technology, in this case, military diving technology. By drawing on primary sources produced by the Dutch assistance team stationed in Indonesia from 1950 to 1954, this article demonstrates that the introduction of military diving technology by the Royal Netherlands Navy was marked by negotiation and contestation regarding efforts to define how technology should be used in a postcolonial context and in asserting sovereignty over uninhabited realms such as the underwater world.

**Keywords:**  
diving;  
TNI-AL;  
Round Table  
Conference;  
Dislambair

## Abstrak

Artikel ini mengkaji pendirian dinas penyelaman angkatan laut TNI-AL yang terjadi sebagai salah satu konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar (KMB) dari pendekatan teknosains pasca-kolonial. KMB sebagai peristiwa transisi politik telah menciptakan sebuah ruang negosiasi antara Belanda dengan Republik Indonesia Serikat dalam menentukan pembangunan republik yang baru mendapatkan pengakuan secara lebih luas. Salah satu bentuk negosiasi tersebut adalah pemberian izin bagi angkatan laut Kerajaan Belanda untuk melaksanakan program asistensi kepada angkatan laut Republik Indonesia Serikat, salah satunya dalam pendampingan pembentukan dinas penyelam. Program asistensi ini kemudian terbentuk menjadi sebuah konteks di mana dialog pasca-kolonial terkait pemanfaatan teknologi, dalam hal ini teknologi penyelaman militer. Dengan mengakses sumber-sumber primer yang diproduksi oleh tim pendampingan KM yang bertugas di Indonesia pada tahun 1950-1954, artikel ini menunjukkan bahwa proses pengenalan teknologi penyelaman militer

**Kata Kunci:**  
penyelaman;  
TNI-AL;  
Konferensi  
Meja Bundar;  
Dislambair

oleh KM diwarnai oleh negosiasi dan kontestasi yang berkenaan dengan upaya-upaya mendefinisikan bagaimana teknologi seharusnya digunakan dalam konteks pasca-kolonial hingga kedaulatan di wilayah yang tidak dihuni oleh manusia yaitu dunia bawah air.

## Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dibentuk pada 10 September 1945, kurang dari satu bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya (Deppen RI, 1959: 219-220). Setelah didirikan, TNI-AL, pada periode tersebut masih bernama Badan Keamanan Rakyat–Laut (BKR Laut), tidak dapat langsung berperan seperti kekuatan matra laut pada umumnya. Organisasi tentara matra laut ini dituntut untuk terlibat dalam Perang Kemerdekaan yang dominan berlangsung dalam bentuk pertempuran darat.

Pada perkembangannya, unsur-unsur tentara laut yang tersebar di berbagai wilayah dan menginduk pada komando yang berbeda kemudian diintegrasikan menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) (Mabes ABRI, 1976: 40). Dengan markas besar yang berkedudukan di Yogyakarta, ALRI berangsur-angsur mewujudkan postur sebagai sebuah kekuatan matra laut. Infrastruktur fisik kala itu belum siap untuk dikembangkan karena kondisi perang yang masih berkecamuk. Pengadaan alat utama sistem senjata secara mandiri dilakukan dengan sangat terbatas dan sering kali secara diam-diam. Sementara itu, peninggalan AL Belanda, Koninklijke Marine (selanjutnya akan ditulis KM) masih dikuasai oleh pemiliknya yang sedang mengupayakan rekolonisasi atas Indonesia. Di sisi lain, penggunaan peninggalan milik AL Jepang juga dilakukan secara terbatas dan tertutup.

Di antara operasi keangkatanlautan yang tidak dapat segera dilaksanakan pada periode Revolusi dan Perang Kemerdekaan (1945-1949) adalah urusan penyelaman. Pada awal dekade 1940an, Perang Dunia II melibatkan penggunaan ranjau dan torpedo laut dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai gambaran umum, sekutu telah menggunakan kurang lebih 260.000 ranjau laut selama Perang Dunia II, 76.000 di antaranya disebar di perairan milik lawan yang dikenal sebagai Blok Poros (*Axis*) (Levie; 2023, 77). Selain itu, penggunaan kapal selam oleh kedua kubu turut mendorong pengembangan dan penggunaan torpedo laut secara masif di berbagai palagan (Branfill-Cook; 2014, 9). Tanpa sering disadari, senjata-senjata bawah laut ini meninggalkan residu yang dapat membahayakan aktivitas pelayaran sipil dan militer.

Fakta ini membuat operasi penyelaman di lingkungan angkatan laut terutama ketika— dan pasca Perang Dunia II diposisikan sebagai aspek yang krusial. Operasi penyelaman di lingkungan angkatan laut bahkan secara

spesifik diatur di dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada Agustus-Desember 1949 di Den Haag, Belanda (Secretariat-General., 1949: 56). Konferensi ini merupakan momen transisi penting yang meneguhkan kemerdekaan Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia yang telah merdeka masih harus bergulat dengan klaim pemerintah kolonial Belanda yang sebelumnya telah menyerah kepada pemerintah militer Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942. Secara umum, KMB diketahui sebagai pertemuan yang menghasilkan ketentuan terkait kedaulatan, namun belum banyak karya yang melihat dampaknya terhadap pembangunan kekuatan militer Indonesia.

Sejarah dunia penyelaman di Indonesia, terutama terkait penyelaman militer, belum ditulis secara komprehensif. Perhatian yang relatif minim ini kemungkinan disebabkan oleh aktivitas penyelaman yang hanya digeluti oleh segelintir orang. Selain itu, dalam konteks penyelaman di lingkungan angkatan laut, dinas penyelaman sering kali merupakan organisasi yang menginduk pada kesatuan yang lebih besar seperti komando armada, kapal perang, atau dinas ranjau. Situasi ini membuat kesatuan penyelam senantiasa mengamini karakter profesinya untuk “selalu berada di bawah permukaan.”

Berdasarkan argumen-argumen di atas, artikel ini bermaksud untuk menjawab beberapa pertanyaan masalah berikut: *pertama*, bagaimana proses pembentukan dinas penyelaman di lingkup TNI-AL yang merupakan sebuah konsekuensi militer dari proses politik yang lebih besar yaitu Konferensi Meja Bundar (KMB). *Kedua*, apa saja bentuk-bentuk kerja sama antara KM dan TNI-AL dalam pembentukan kesatuan penyelam, terutama terkait proses transfer pengetahuan dan teknologi?

## Kajian Pustaka

Buku *Sejarah TNI Angkatan Laut 1950-1959* oleh TNI-AL yang mencakup tahun pendirian satuan penyelam pada 1952 bahkan belum menjabarkan profil kesatuan ini secara rinci selain bagaimana dinas penyelaman merupakan salah satu dinas pertama di tubuh Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (ALRIS) (Subdirektorat Sejarah TNI-AL, 1987: 15).

Perhatian terhadap sejarah penyelaman militer juga dituangkan dalam penulisan sejarah pasukan-pasukan khusus yang menjadikan aktivitas penyelaman sebagai salah satu kemampuan operasinya, sebagai contoh adalah sejarah Komando Pasukan Katak (Kopaska) dalam *Dari Pantai Biak Ke Pondok Dayung Dan Ujung: Menapaki Era Maritim* oleh Soleyman yang menunjukkan nukilan sejarah bahwa dinas penyelaman (kala itu bernama Komando Pengangkatan Bawah Air, KPBA) adalah salah satu embrio dari pembentukan Komando Pasukan Katak (Soleyman, 2002: 94-95). Hal senada juga diungkapkan oleh terbitan yang lebih komprehensif berjudul *50 tahun Kopaska: Spesialis Pertempuran Laut Khusus* oleh Aviantara dan Sidik. Aviantara

dan Sidik turut menyinggung bagaimana pembentukan Komando Pasukan Katak turut didorong oleh kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Misi Militer Belanda di Indonesia pasca-KMB (Aviantara & Sidik, 2012: 40). Selain itu, dinas penyelaman TNI-AL yang kala itu bernama Komando Penyelamatan Bawah Air ALRI (Kopebal) turut melaksanakan misi-misi awal yang kemudian akan disempurnakan oleh Kopaska (Aviantara & Sidik, 2012: 42). Temuan terkait dinas penyelaman sebagai embrio pasukan khusus juga diungkapkan oleh Ken Conboy pada *Elite: The Special Forces of Indonesia, 1950-2008* (Conboy, 2008: 118-119).

Pada karya-karya di atas, satuan penyelam yang merupakan embrio dari Komando Pengangkatan dan Penyelamatan Bawah Air (Koppeba) dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) semata-mata digambarkan sebagai unsur pembentuk pasukan khusus matra laut, terutama Komando Pasukan Katak. Narasi sejarah dinas penyelaman TNI-AL relatif diskontinu pada publikasi-publikasi di atas, sebuah celah pengetahuan yang akan direspons oleh artikel ini.

Selain itu, ketika artikel ini ditulis, Komando Pengangkatan dan Penyelamatan Bawah Air (KOPPEBA) Komando Armada Republik Indonesia di bawah TNI-AL telah menyusun sebuah penelitian sejarah penyelaman TNI-AL yang lengkap dan menyeluruh. Namun, penelitian yang dihasilkan masih dipublikasikan secara terbatas sehingga belum dapat diinkorporasikan ke dalam artikel ini.

Tidak sekadar rekonstruksi sejarah keangkatanlautan (*naval history*) dengan sejarah selam (*history of diving*) sebagai fokus utamanya, artikel ini berupaya melihat pembentukan dinas penyelaman di lingkungan TNI-AL dari sudut pandang kajian sejarah proses interaksi manusia dengan teknologi, terutama dalam konteks pascakolonial (*postcolonial technoscience*).

Penekanan ini berupaya menghadirkan kajian kritis tentang relasi antara pihak (ex)-kolonial yang kerap memposisikan diri sebagai patron ilmu pengetahuan, teknologi, dan modernisasi dengan (ex)-koloni yang masih disosisikan sebagai pihak yang inferior (Anderson, 2002: 651). Situasi ini menunjukkan bahwa di dalam konteks pascakolonial, pengetahuan dan teknologi, termasuk terkait dengan dunia kemiliteran, tidak netral dan kerap melanggengkan ketimpangan.

Secara lebih spesifik, artikel ini memposisikan pembentukan dinas penyelaman sebagai sebuah “contact zones” sebagaimana dikaji oleh Mary Louise Pratt dalam tulisannya tentang perjumpaan budaya-budaya di dalam penulisan *travelogue* dalam *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation* (Pratt, 1992:). “Contact zones” dimaknai sebuah titik temu, alih-alih sekadar konsep geografi yang rigid, antara kedua entitas dan pemaknaan mereka atas teknologi dan ilmu pengetahuan. Di dalam karya ini, Pratt mengungkapkan bahwa “contact zones” adalah:

*“Social spaces where disparate cultures meet, clash, and grapple with each other, often in highly asymmetrical relations of domination and subordination such as colonialism and slavery,”*

“ruang lingkup-ruang lingkup sosial dimana kebudayaan yang berbeda saling bertemu, berbenturan, dan berkonstestasi, seringkali di dalam hubungan yang amat asimetrikal, ditandai dengan keberadaan dominasi dan subordinasi seperti kolonialisme dan perbudakan” (Pratt, 1992: 7)

Berdasarkan kutipan di atas, proses pembentukan sebuah organisasi (dalam hal ini adalah dinas penyelaman TNI-AL) yang terjadi pada konteks pasca-kolonial akan coba ditempatkan sebagai sebuah *contact zone*. Istilah ini juga digunakan sebagai alternatif yang lebih setara dalam melihat proses ini, terutama untuk membantah teori “difusi” yang menempatkan negara kolonial sebagai pemberi dan negara koloni sebagai penerima (yang pasif) atas teknologi (Anderson, 2002: 651).

Memosisikan proses ini sebagai sebuah zona kontak menuntut kajian atas pembentukan dinas penyelam menginkorporasikan sudut pandang yang berimbang dari sisi KM dan TNI-AL. Faktanya, peran KM dalam pembentukan dinas penyelaman TNI-AL belum pernah secara serius dikaji. Namun, tanpa harus menunggu kajian dari “sisi KM,” artikel ini bermaksud memantik diskusi dan penelitian lanjut di bidang sejarah penyelaman Indonesia, baik dalam aspek militer maupun aspek lainnya, terutama dengan mengeksplorasi sumber primer yang menawarkan sudut pandang Indonesia.

## Metode

Sejarah penyelaman berkaitan dengan eksplorasi pemanfaatan dunia di bawah permukaan air, yang tidak cocok dengan kondisi fisiologi manusia, untuk berbagai kepentingan. Dalam mencapai kepentingan ini, manusia menciptakan berbagai teknologi yang dapat menanggulangi keterbatasan kemampuan biologisnya (Marx, 1978: 2-3). Perkembangan pada bidang teknologi sub akuatik ini kemudian memungkinkan manusia untuk menggunakan aktivitas penyelaman dalam berbagai bidang, termasuk penyelaman militer.

Oleh karena itu, sejarah penyelaman militer dapat dilihat sebagai titik temu antara relasi manusia dan teknologi serta aplikasinya di dalam konteks militer, terutama operasi keangkatanlautan. Pendekatan ini mempengaruhi upaya merekonstruksi sejarah penyelaman militer yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber yang diproduksi oleh organisasi penyelaman seperti angkatan laut. Penelusuran ini dilakukan dengan pemahaman bahwa sumber terkait dinas penyelaman tidak berjumlah sebanyak sumber-sumber yang berkenaan dengan operasi kapal, baik kapal

permukaan maupun kapal selam. Sebab memiliki tugas yang unik dan pelatihan yang keras, dinas penyelam pada banyak angkatan laut di dunia adalah kesatuan yang kecil, minim sorotan dan diposisikan sebagai sebuah sub-organisasi.

Sebab artikel ini menyoroti periode transisi, maka penelitian ini mengombinasikan sumber primer dan sekunder yang dimiliki oleh dua angkatan laut: KM milik Kerajaan Belanda dan TNI-AL. Sumber-sumber yang diakses didominasi oleh koleksi arsip nasional Belanda atau Nationaal Archief (selanjutnya akan ditulis NA), Koninklijke Bibliotheek (selanjutnya akan ditulis KB) dan perpustakaan universitas Leiden atau Universitaire Bibliotheek Leiden (selanjutnya akan ditulis UBL) yang berkedudukan di Leiden, Belanda.

Arsip KM yang dimaksud adalah inventaris milik NA bernomor 2.13.73 dengan judul “Inventaris van het archief van de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië, (1947) 1950-1954.” Inventaris arsip ini memuat dokumen-dokumen terkait proses transisi dari tentara kolonial Belanda yang berlangsung setelah Konferensi Meja Bundar pada awal tahun 1950 hingga 1954. Salah satu aspek dari misi ini adalah transisi yang dilakukan oleh KM kepada ALRI, termasuk pada proses serah terima tugas-tugas penyelaman.

Sementara itu, untuk sumber primer dan sekunder yang berada di KB dan UBL adalah majalah-majalah atau koran-koran sezaman yang mempublikasikan informasi terkait proses serah terima tugas-tugas penyelaman dari KM kepada ALRI. Media massa seperti koran dan majalah yang mengunggah reportase terkait proses transisi organisasi dari KM ke TNI-AL. Dalam bentuk publikasi sekunder, beberapa volume *Sejarah TNI AL* dan terbitan TNI-AL lainnya juga dapat ditemukan pada koleksi UBL.

Penelitian ini menggunakan sumber sesuai proporsi dan konteksnya. Sumber-sumber berbentuk peraturan atau hasil konferensi sebagaimana hasil KMB dilihat sebagai kondisi ideal yang diharapkan sehingga tidak selalu dapat digunakan untuk memberi gambaran riil atas peristiwa yang terjadi. Selain itu, mayoritas dokumen yang diakses oleh penelitian ini adalah dokumen resmi yang memerlukan informasi komplementer dari dokumen yang memuat narasi-narasi personal. Dalam menarasikan peristiwa yang terjadi, kombinasi antara sumber Belanda dan Indonesia adalah keharusan dengan tujuan memperoleh gambaran yang lengkap dan seimbang.

Interpretasi kritis atas sumber-sumber di atas akan disusun dalam empat subbagian yang akan melihat bagaimana proses pembentukan dinas penyelaman TNI-AL dan perannya sebagai zona kontak (*contact zone*) pada konteks teknosains di Indonesia pasca-kolonial. Sub-bagian tersebut terdiri dari *pertama*, posisi sejarah penyelaman (militer) Indonesia dan kaitannya dengan sejarah penyelaman pada masa kolonial. Bagian *kedua* akan memusatkan perhatian kepada penyelenggaraan KMB dan dampaknya



bagi dunia penyelaman militer di Indonesia. Selanjutnya, bagian *ketiga* akan berkenaan dengan dampak KMB dan pembentukan fondasi dari dinas penyelaman ALRI. Kemudian, bagian *keempat* akan menjabarkan kelanjutan dan pengakhiran kerja sama antara KM dan ALRI dalam pengembangan organisasi dan kapasitas penyelam ALRI. Empat subbagian ini akan ditutup dengan sebuah kesimpulan.

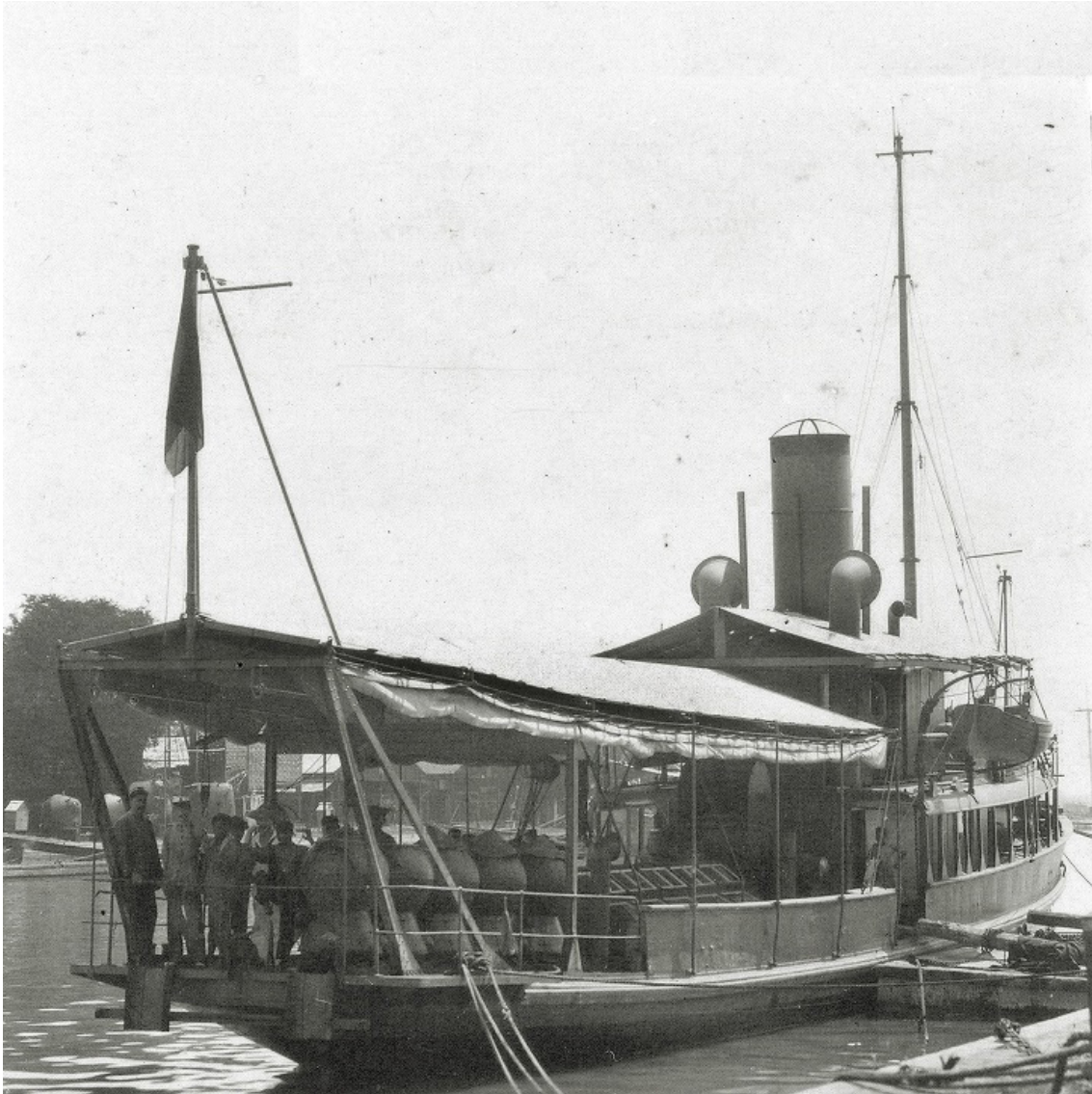
### **Konteks: Sejarah Penyelaman di Indonesia**

Aktivitas penyelaman tertua pada peradaban manusia dipercaya sudah dilakukan sejak periode Yunani-Romawi. Plato dan Homer, sebagai contoh, menuliskan dalam eposnya bahwa masyarakat di Pulau Kalymnos di tenggara Yunani telah menyelam untuk mendapatkan sumber daya laut berupa sponge di Laut Aegea (Karkavitsas: 2021, XLIV). Praktik-praktik penyelaman tempatan yang dianggap sebagai pendahulu aktivitas selam berteknologi modern seringkali dikaitkan dengan tujuan utama mendapatkan sumber daya laut dengan teknik penyelaman menahan napas (*breath-holding diving*) atau saat ini lebih dikenal sebagai penyelaman bebas atau *free diving*). Contoh lain dari praktik ini adalah para *ama* atau perempuan penyelam mutiara dan hewan laut lainnya di Jepang.

Berangkat dari konteks yang sama, sejarah penyelaman Indonesia idealnya dapat diawali dari suku-suku laut seperti Bajau yang tinggal di perairan di antara Kepulauan Indonesia, Malaysia Timur dan Kepulauan Filipina, terutama Kepulauan Sulu. Pada suku-suku laut seperti Bajau, aktivitas menyelam dilakukan sebagai bagian dari adaptasi mereka dengan lingkungan laut (Warren: 2014, 72-74 & Sather: 1997, 119 & 123).

Selain pemenuhan kebutuhan hidup sebagai tujuan utama penyelaman, terdapat pula temuan bahwa orang Bajau menggunakan kemampuan menyelamnya untuk kepentingan militer. Pada tahun 1823, seorang tokoh perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dari Bulu-Bulu, Sinjai, Sulawesi Selatan bernama Baso Kalaka Sullewatang dikabarkan dibantu oleh laskar Bajau. Dalam membantu pergerakan pasukan Baso Kalaka, Laskar Bajau menyamar menjadi nelayan untuk melakukan penyelaman sabotase dengan cara melubangi lambung sebuah kapal Belanda, Hr. Ms. Groningen. Kapal ini kemudian berhasil ditenggelamkan bersama dua belas awaknya. Serangan yang tidak diduga ini berhasil memaksa kapal-kapal Belanda untuk mencari tempat tambatan yang lain (Abduh: 1985, 62). Betapa pun heroik, sejarah penyelam militer modern di Indonesia belum dianggap sebagai kelanjutan dari sejarah para penyelam Bajau melainkan dinas penyelam angkatan laut Belanda.

Aktivitas penyelaman di lingkup KM, terutama untuk perairan dangkal, telah beroperasi sejak abad ke-19. Pada periode ini, angkatan-angkatan laut di dunia, salah satunya Royal Navy di Inggris dan US Navy di Amerika Serikat,



**Figur 1.** Kapal pendukung operasi penyelaman Hr.Ms. Hercules. **Sumber:** NIMH 2158\_001536.

mulai memikirkan metode untuk mengeksplorasi sejauh mana dunia bawah air dapat mendukung operasi keangkatanlautan. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan dunia penyelaman (terutama dengan metode menahan/mengelola nafas, *free diving*) yang telah eksis selama ribuan tahun dengan penemuan teknologi pernapasan bawah air yang kala itu masih dirintis. Sebagai hasilnya, penyelam-penyelam militer pertama seringkali menginduk di bawah kesatuan zen (engineers) yang bertugas untuk meniadakan rintangan bagi pasukan kawan dan berperan dalam eksperimen-eksperimen teknologi kemiliteran (Kuntz: 2016, 196). Fungsi penyelam sebagai kepanjangan armada atau pangkalan dalam melancarkan pelayaran berusia lebih tua dibandingkan dengan fungsi penyelaman sebagai media infiltrasi.



Tidak ubahnya di Inggris dan Amerika Serikat, KM belum membentuk satuan khusus penyelam dan teknologi penyelaman yang diterapkan masih bersifat eksperimental, salah satunya oleh seorang perwira KM bernama Olke Arnoldus Uhlenbeck (Lemmers: 2022, 35). Namun, kesatuan khusus penyelam untuk melaksanakan tugas-tugas keangkatanlautan seperti pekerjaan-pekerjaan bawah air, penanganan bahan peledak bawah air dan pengangkatan objek dari bawah air baru dibentuk pada tahun 1929 sebagai bagian dari satuan kapal selam (*onderzeedienst*). Transformasi organisasi penyelaman ini tidak hanya terjadi di Belanda namun juga di Hindia Belanda (*De Indische Courant*, 9-12-1932).

Para penyelam KM memiliki pengalaman pada beragam operasi bawah air. Pada tahun 1932, para penyelam KM dilibatkan dalam operasi evakuasi dan pengangkatan sebuah pesawat amfibi Dornier 26 milik dinas penerbangan KM. Pesawat ini mengalami kecelakaan tak jauh dari pangkalan udara AL Belanda di Morokrembangan, Surabaya (*De Indische Courant*, 15-4-1932). Para penyelam ditugaskan bersama dengan kapal H.M. *Hercules* untuk mengangkat bangkai— dan awak pesawat yang terjebak di kedalaman sembilan meter. Sebelum penugasan H.M. *Hercules* yang memiliki alat derek dan kru penyelam, KM hanya menemukan korban yang terapung namun gagal mengevakuasi awak pesawat yang terjebak di bawah air. Kerja sama *Hercules* dan para penyelam berhasil mengangkat bangkai pesawat namun tidak dapat menyelamatkan jiwa para awak pesawat (*De Indische Courant*, 15-4-1932.)

Selain pada insiden Dornier 26, para penyelam KM juga terlibat dalam operasi evakuasi insiden kapal yang terkenal dengan istilah “Titanic versi Hindia Belanda” yaitu tenggelamnya Kapal Van Der Wijk pada bulan November tahun 1936. Pada Maret 1937 *Soerabaijasch Handelsblad* merilis sebuah artikel yang mengulas kompleksitas operasi penyelaman KM pada insiden Van Der Wijk (*Soerabaijasch Handelsblad*, 06-03-1937).

Salah satu faktor di balik kompleksitas operasi penyelaman ini adalah posisi bangkai kapal yang berada di kedalaman 45-50 meter. Di kalangan penyelam KM pada era tersebut, penyelaman yang lebih dalam dari 30 meter dianggap sebagai penyelaman luar biasa. Penyelaman ini dilakukan menggunakan sebuah peralatan khusus berupa “baju selam” berbobot 100 Kg dengan tutup kepala berupa helm dengan kabel yang terhubung ke kapal di permukaan (*Soerabaijasch Handelsblad*, 06-03-1937). Kabel tersebut berfungsi sebagai penyuplai udara dan alat komunikasi antara penyelam dengan kru di permukaan. Berdasarkan fungsinya, kabel ini sering dijuluki “tali pusat” para penyelam (*diver’s umbilical cords*).

Pada penyelaman terkait insiden Van Der Wijk, penyelam KM dipandu oleh kapal permukaan bernama *Castor* yang menurunkan delapan penyelam secara bergantian dengan menggunakan sebuah “lift” yang terhubung dengan

sebuah derek (*crane*) ke kedalaman 15 meter. Dari kedalaman 15 meter, penyelam bergerak menuruni kedalaman hingga mencapai 48 meter dengan tekanan 5,8 Atmosfer dan bertahan untuk mengidentifikasi dan mengangkat beberapa bagian dari bangkai Van Der Wijk. Sesaat setelah karam, *Koninklijke Paketsvaart Maatschappij* (KPM), selaku pemegang saham terbesar dari kapal Van Der Wijk, memutuskan untuk tidak mengangkat bangkai kapal ke permukaan karena kendala kedalaman dan kesulitan operasional (*Soerabaijasch Handelsblad*, 06-03-1937).

Oleh karena itu, pengangkatan seadanya dilakukan dan penyelam kembali ke permukaan dengan melakukan pemberhentian wajib demi menurunkan kadar nitrogen pada darah mereka, salah satunya pada kedalaman 12 meter sebelum ditarik kembali ke atas kapal. Bahkan setelah penyelaman yang sangat taat prosedur tersebut, beberapa penyelam KM harus memasuki kamar dekompresi di darat selama 40 menit (*Soerabaijasch Handelsblad*, 06-03-1937).

Selain operasi-operasi penyelamatan seperti di atas, penyelam KM juga bertugas pada medan yang tidak biasa seperti penyelaman dalam rangka survei kandungan emas pada sebuah sungai di Lawang di wilayah Sumatera Utara saat ini (*Soerabaijasch handelsblad*, 23-11-1937). Tidak seperti penyelam rekreasi, para penyelam KM kerap beroperasi di bawah perairan dengan jarak pandang yang kurang baik.

Pada perkembangannya, kesatuan penyelam KM dengan latar belakang operasional seperti yang telah dijabarkan sebelumnya yang akan turut membentuk kesatuan penyelam milik TNI-AL. Sebagaimana telah disinggung di bagian pembuka, baik operasi KM maupun ALRI diinterupsi oleh periode Revolusi dan Perang Kemerdekaan yang berlangsung pada tahun 1945-1949. Pada periode ini, KM masih dapat beroperasi seperti angkatan laut pada umumnya, sementara ALRI harus memprioritaskan keterlibatannya pada pertempuran-pertempuran di darat bersama kesatuan dari matra lain.

### **Transisi: Konferensi Meja Bundar dan Penyelaman Militer di Indonesia**

Upaya militer Belanda dalam klaim kepemilikannya atas Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan terpaksa berakhir di penghujung tahun 1949. Setelah melancarkan Agresi Militer II pada Desember 1948, Belanda dan Indonesia sepakat untuk bertemu di meja perundingan di Den Haag. Perundingan ini kemudian dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar (kemudian akan ditulis sebagai KMB) yang berlangsung antara Agustus hingga Desember 1949.

Secara umum, KMB dikenal sebagai perundingan yang membuahkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Pengakuan kedaulatan via jalur diplomasi ini memiliki konsekuensi dilanjutkannya hubungan Belanda-Indonesia yang cenderung bersahabat betapa pun telah melewati

fase konfrontasi militer selama bertahun-tahun. Salah satu manifestasi dari “hubungan yang bersahabat” tersebut adalah pembentukan Uni Indonesia-Belanda, disepakatinya pembentukan Republik Indonesia Serikat (untuk memfasilitasi kepentingan negara-negara federal), dan keberlanjutan tugas beberapa kesatuan militer Belanda.

Menurut publikasi atas draf persetujuan KMB yang berjudul lengkap *Round Table Conference Results as Accepted in the Second Plenary Meeting Held on 2 November 1949 in the “Ridderzaal” at the Hague*, KMB membahas dua jenis topik: *pertama*, topik “serah terima kedaulatan” dan *kedua*, topik terkait “langkah-langkah transisi pemerintahan” (Secretariat-General., 1949: 3-5). Terkait langkah-langkah transisi, terdapat tiga sub-bagian yang menyoroti aspek kewarganegaraan (*citizens*), aspek pemerintahan sipil (*civil government officials*), dan urusan-urusan militer (*military affairs*) (Secretariat-General., 1949: 3-5). Delegasi Indonesia untuk urusan-urusan militer adalah Kolonel T.B. Simatupang (AD), Kolonel R. Soebijakto (AL), Komodor Suryadarma (AU), Letnan Kolonel Daan Jahja (AD), dan Letnan Kolonel M.T. Haryono (AD) (Subdirektorat Sejarah TNI-AL, 1987: 5).

Pada pembahasan terkait urusan-urusan militer, KMB mengatur ketentuan pada tiga matra: angkatan laut, darat, dan udara. Pada pembahasan yang berkenaan dengan angkatan laut, terdapat pembahasan mengenai kelanjutan eksistensi KM di Indonesia. Ketentuan ini mengatur bahwa secara umum KM tidak lagi boleh menempatkan pasukan di wilayah Republik Indonesia Serikat. Namun, pada aspek-aspek tertentu, Republik Indonesia Serikat boleh mengajukan pembentukan satuan tugas yang dapat membantu pengembangan awal organisasi ALRI atau operasi-operasi keangkatanlautan tertentu (Secretariat-General., 1949: 55-56).

Program ini diizinkan dengan beberapa syarat: *pertama*, semata-mata berkenaan dengan aspek yang belum dapat dilakukan secara mandiri oleh ALRI, *kedua*, direncanakan untuk dapat dikurangi dari waktu ke waktu atau seiring berjalannya waktu, atau dengan kata lain, volume kerja sama tidak boleh semakin membesar, *ketiga*, direncanakan untuk diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, *keempat*, tidak diperkenankan berlangsung lebih dari satu tahun kecuali ditentukan lain (Secretariat-General., 1949: 55-56).

Selanjutnya, KMB mengesahkan pemberian amanat oleh ALRI kepada KM untuk menjalankan program asistensi pada empat aspek operasi keangkatanlautan. Keempat aspek tersebut adalah: *pertama*, asistensi pada pengembangan kesatuan ALRI yang bertugas untuk menjalankan patroli, *kedua*, penyapuan dan penjinakan ranjau laut, termasuk pula operasi penyelaman dan pengangkatan bawah air, *ketiga*, operasi hidrografi. dan *keempat*, penerbangan angkatan laut. Dari keempat aspek tersebut, hanya penerbangan angkatan laut yang menyematkan terminologi “asistensi,” sementara pada ketiga aspek lainnya, ALRI bergantung lebih banyak kepada



**Figur 2.** Kolonel Nazir dari ALRIS (berdasi) berdiri di sebelah kanan Kolonel Montanus (Komandan KM di Surabaya) yang sedang menyalami Sekretaris Angkatan Laut Belanda, Schout-Bij-Nacht H.C.W. "Harry" Moorman dalam kunjungannya ke Surabaya dalam rangka serah terima dan transisi tugas KM kepada ALRIS, Februari 1950. **Sumber:** NIMH 2158\_044520

kekuatan armada dan personel KM dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut (Secretariat-General., 1949: 56).

Pada awalnya, Misi Militer Belanda di Republik Indonesia pada aspek angkatan laut dipimpin oleh Commandeur (setara Kolonel Laut) Van Dongen. Van Dongen menjabat sejak transisi (Januari 1950) hingga Desember 1950. Pada periode yang sama, terdapat pula Commandeur Montanus yang menjabat sebagai komandan KM di Surabaya, tempat mayoritas misi asistensi KM kepada ALRIS berlangsung.

Pada akhir tahun 1950, Commandeur Montanus dipercaya untuk mengambil alih posisi komandan misi KM di Indonesia. Misi KM di Republik Indonesia Serikat dibantu oleh sekitar seribu orang anggota. Jumlah ini kemudian berangsur-angsur dikurangi. Dalam beberapa kesempatan, pihak ALRIS yang bekerja sama dengan Montanus adalah Kolonel Nazir dari ALRIS yang menjabat sebagai Komandan Daerah Maritim Surabaya sejak awal tahun 1950 (Umar, 1985:28).

Terkait dengan kesepakatan ini, pihak Belanda kerap "meminta kebijaksanaan" pihak Indonesia untuk memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Betapa pun secara teknis ALRIS dan militer Indonesia pada umumnya memerlukan bantuan ini, sikap yang ditunjukkan oleh pihak Belanda sering kali terkesan menggurui. Pada publikasi-publikasi terkait Misi Militer Belanda di Republik Indonesia Serikat (dalam bidang keangkatanlautan sering disebut sebagai *Marine Missie*), pihak Belanda kerap memamerkan "kebaikan hatinya" dalam memberikan semua jenis bantuan yang diperlukan oleh pihak ALRIS.

Amanat yang tersirat dalam draf Keputusan KMB inilah yang memberi ruang para penyelam KM untuk tetap beroperasi di wilayah perairan RIS





**Figur 3.** V.J.A. Wilkens, komandan kedua sekaligus terakhir dari misi penyelam KM di Indonesia. **Sumber:** NIMH 2009-014-042\_007

setelah tahun 1949. Penyelam KM yang terlibat dalam misi ini beroperasi di bawah Dinas Penyelaman (Marine Duik Bedrijf, MDB) dan Dinas Penyapu Ranjau (Marine Mijn Opruimings Dienst, MOD) yang berkedudukan di Jakarta dan Surabaya. Dalam aspek asistensi dan pelatihan, para penyelam KM dipimpin oleh seorang perwira berpangkat Luitenant Ter Zee tingkat II atau III. Selama misi terkait penyelaman ini dilaksanakan, terdapat dua perwira yang diketahui mengepalai tim penyelam KM yaitu Luitenant Ter Zee II W. Van Pesch dan Luitenant Ter Zee II V.J.A. Wilkens.<sup>1</sup>

Hanya berselang tiga bulan sejak penandatanganan KMB, KM sudah menyelenggarakan kursus penyelaman militer pertama untuk anggota ALRI yang dilaksanakan di Surabaya. Sementara itu, di tahun yang sama, komandan ALRI kala itu turut mengeluarkan maklumat terkait pembentukan “dinas penyelaman” yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut.

### **Pembentukan Zona Kontak: Kelahiran Organisasi Penyelaman ALRI**

Setelah Konferensi Meja Bundar, ALRIS (Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat) berdasarkan inisiatif dan konsolidasi internal memutuskan untuk menyertakan dinas penyelaman dalam struktur organisasi ALRIS. Ketentuan ini tercantum pada Surat Keputusan menteri pertahanan No. 34/MP/50 pada tanggal 4 Februari 1950. Peraturan ini memuat pembentukan organisasi ALRIS yang salah satu unsurnya adalah jawatan-jawatan yang terdiri dari jawatan kesehatan, perhubungan, angkutan, pendidikan, hidrografi,

---

1) “Rapporten verrichtingen van het Marine Duikbedrijf Oosten en Mijnen Opruim Dienst Oosten,” National Archief (NA), Den Haag, Inventaris van het archief van de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië, (1947) 1950-1954, inv.nr. 226. fol. 114.



penerbangan, kepolisian, penyapu dan pembersih ranjau, dan penyelam dan pengangkatan. Surat keputusan ini ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku menteri pertahanan di Jakarta dan disalin oleh seorang anggota Direktorat Hukum AL bernama Sapmati (Subdirektorat Sejarah TNI-AL, 1987: 15).

Pada waktu yang bersamaan, ALRIS tetap memanfaatkan kesempatan pengembangan organisasi dengan bantuan KM yang difasilitasi secara legal oleh hasil Konferensi Meja Bundar. Dalam aspek penyelaman, ALRIS dan KM melaksanakan berbagai program, salah satunya adalah pendidikan penyelam angkatan laut terutama di wilayah yurisdiksi Komando Kota Angkatan Laut Djakarta (KKALD) dan Komando Daerah Maritim Surabaya (KDMS).

Pelaksanaan pendidikan penyelam ALRIS pertama kali diselenggarakan di Surabaya. Pendidikan ini dipimpin oleh seorang perwira latihan bernama Letnan Laut Kelas Dua P. Van Pesch. Selain sebagai perwira latihan, Van Pesch adalah komandan satuan penyelam KM zona timur yang berpangkalan di Surabaya.<sup>2</sup>

Pelatihan diselenggarakan pada 1 Maret 1950 hingga 1 Mei 1950 dan dilanjutkan pada 1 Agustus 1950 hingga 1 November 1950. Patut dijadikan catatan bahwa pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan oleh Presiden Sukarno dan sebagai salah satu konsekuensinya, ALRIS kembali menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Secara keseluruhan, pelatihan angkatan ke-1 dilaksanakan selama empat bulan.

Peserta pelatihan ini terdiri dari lima orang Indonesia dengan profil dan hasil pelatihan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Peserta pelatihan pendidikan penyelaman ALRIS tahun 1950

No	Nama	Nomor Registrasi	Pangkat	Latar Belakang	Nilai Akhir
1	N. Hadiwiryono	123/P	Kapten	Ex.KM	Cukup
2	A. Dachlan	-	Kapten	Ex.KM	Cukup
3	Busro	-	Sersan Mayor	Ex.KNIL	Cukup
4	Sulaiman	198	Sersan Mayor	Ex.KNIL	Cukup
5	Suminto	-	Sersan Mayor	TNI	Cukup

**Sumber:** Rapport betreffende de werkzaamheden van het Marine Duikbedrijf Oosten / Mijnen Opruimdienst Oosten, met geleidebrief," National Archief (NA), Den Haag, Haag, Inventaris van het archief van de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië, (1947) 1950-1954, inv.nr. 272. fol. 6.

Pelatihan yang dilaksanakan memiliki fase teori dan praktik. Pada fase teori, para instruktur KM berkesimpulan bahwa seluruh peserta mengalami

2) "Rapport betreffende de werkzaamheden van het Marine Duikbedrijf Oosten / Mijnen Opruimdienst Oosten, met geleidebrief," National Archief (NA), Den Haag, Haag, Inventaris van het archief van de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië, (1947) 1950-1954, inv.nr. 272. fol. 4.

kesulitan dalam memahami aspek keilmuan penyelaman yang disampaikan dalam bahasa Belanda. Menurut laporan Van Pesch, materi yang diberikan sama dengan teori penyelaman yang disampaikan kepada penyelam KM.<sup>3</sup>

Bercermin dari kesulitan tersebut, materi penyelaman untuk penyapuan dan penanggulangan ranjau yang sedianya akan disampaikan oleh para penyelam dari *Mijnen Opruimings Dienst* (MOD) ditiadakan. Selanjutnya, situasi ini disikapi oleh KM dengan menyarankan ALRI untuk tetap menyerahkan tugas-tugas penyapuan ranjau kepada penyelam MOD dari KM.

Pada fase praktik, beragam tantangan dihadapi oleh instruktur dan peserta. Dari segi peralatan, para instruktur mengeluhkan keterbatasan peralatan yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan. Sebagai contoh, peserta pelatihan tidak dapat menggunakan pakaian selam secara utuh. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggunakan helm selam karena ketidaksesuaian ukuran baju selam dengan ukuran tubuh peserta. Secara khusus, instruktur mencatat bahwa seluruh peserta pelatihan *kedodoran* ketika mengenakan baju selam perairan dangkal (*ondiep-wateruitrusting*) milik KM.<sup>4</sup>

### **Rekonfigurasi: Kelanjutan Kerja Sama Pelatihan Penyelam ALRI**

Setelah program pelatihan penyelam angkatan laut angkatan pertama ditutup, para penyelam KM tidak langsung meninggalkan wilayah Indonesia, betapa pun komposisi personelnya dikurangi secara bertahap. Para penyelam KM masih dibutuhkan dalam beberapa program asistensi pengembangan dinas penyelam ALRI. Sejak awal tahun 1951, berbagai program pendidikan dan non-pendidikan dilaksanakan oleh penyelam dari kedua belah pihak.

Menurut sebuah laporan yang dirilis pada Februari 1951, pada awal tahun tersebut operasi penyelaman angkatan laut di Indonesia masih diatur dengan ketentuan sebagai berikut: sampai pendidikan lanjutan penyelam dilaksanakan, tugas-tugas primer penyelaman (seperti penyelamatan bawah air dan penanggulangan bahan peledak bawah air) ditangani oleh penyelam KM. Sementara itu, sebelum kursus-kursus lanjutan dilaksanakan, penyelam ALRI hanya menjalankan fungsi-fungsi sekunder berupa dukungan permukaan, perawatan, logistik, dan tugas-tugas serupa. Di dalam laporan yang sama, Letnan Van Pesch sangat berharap ALRI dengan sepenuh hati berkenan mendengarkan masukan dan arahan penyelam KM.<sup>5</sup>

Selanjutnya, KM menyelenggarakan beberapa pelatihan penyelaman tingkat lanjut dan menyarankan ALRI untuk melakukan beberapa perbaikan, terutama dalam aspek pengadaan peralatan dan pengetatan seleksi bagi calon peserta pelatihan. Salah satu hal yang menarik adalah tidak ditetapkannya

3) "Rapport betreffende de werkzaamheden..." *Ibid.*, fol. 7.

4) "Rapport betreffende de werkzaamheden..." *Ibid.*, fol. 7.

5) "Rapporten verrichtingen van het Marine..." *Ibid.*, fol. 34-36.

standar kesehatan tertentu bagi calon peserta. KM justru menyampaikan kepada ALRI agar memikirkan suatu standar kesehatan “khusus orang Indonesia.”<sup>6</sup>

Sepanjang tahun 1951, KM beberapa kali menyelenggarakan kursus penyelaman demolisi. Bahkan, kursus pertama yang diselenggarakan pada tahun 1951 secara khusus ditujukan untuk mengenal bangkai kapal perang Jepang dan bahan peledak yang tertinggal di dalamnya. Kursus ini berlangsung selama 14 hari dan dimulai pada 12 Februari 1951 dan memiliki kuota sembilan orang peserta yang kemudian hanya dihadiri oleh tiga orang peserta latihan. Setelah itu, pada 1 Maret 1951, KM menyelenggarakan kursus penyelaman demolisi untuk penanganan bahan peledak lainnya seperti bahan peledak buatan Inggris dan ranjau laut Jepang.<sup>7</sup>

Tidak ubahnya program pendidikan penyelaman angkatan pertama, instruktur dari KM menganggap bahwa program kursus masih sulit dilaksanakan pada aspek praktik dan teori. Pada aspek praktik, para instruktur mengeluhkan jumlah peralatan yang relatif minim. Tidak banyak hal yang dapat dilakukan oleh para instruktur dalam menghadapi situasi ini. Permintaan ke KM tidak dapat dilakukan karena berdasarkan KMB, kekuatan KM hanya boleh berada di Indonesia jika mereka merupakan bagian dari program asistensi terhadap ALRI.

Selain itu, pada aspek teori, para instruktur masih menggunakan diktat-diktat yang dipakai untuk melatih penyelam-penyelam KM. Tentu, diktat-diktat ini mengandung pelajaran pengetahuan akademik penyelaman yang disampaikan dalam bahasa Belanda. Kemudian, penguasaan bahasa Belanda yang tidak mencapai level yang diinginkan menjadi isu yang dikeluhkan oleh para instruktur. Sebagai konsekuensi berikutnya, penguasaan substansi pengetahuan akademik penyelaman juga terdampak oleh rintangan bahasa ini.

Letnan Van Pesch memberi catatan bahwa: “anggota ALRI belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait ilmu fisika, kimia, dan logika sehingga menghalangi peserta dalam memahami perhitungan terkait tekanan, volume, dan efek injektor.” Ketika keluhan ini ditulis, ALRI baru berdiri selama enam tahun. Pada empat tahun pertama, ALRI juga harus melaksanakan perang kemerdekaan. Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal, pada periode perang kemerdekaan, ALRI belum sepenuhnya berfungsi sebagai angkatan laut disebabkan oleh aspek pertempuran darat yang jauh lebih dominan.

Selain itu, waktu singkat yang dimiliki oleh Misi KM di Indonesia membuat penyusunan diktat yang menyesuaikan demografi peserta belum dimungkinkan. Meskipun begitu, seorang peserta tanpa nama (hanya ditulis sebagai “peserta kursus,” *cursist*) pada kursus penyelaman demolisi yang dibuka

---

6) *Ibid.*, fol. 35.

7) *Ibid.*, fol. 58-59.

pada 1 Maret 1951 berhasil mendapatkan nilai 91,5 dari 100.<sup>8</sup>

Pada bulan-bulan selanjutnya, KM memusatkan perhatiannya pada penyelenggaraan program pelatihan kemampuan penyelaman tingkat lanjut. Pada April 1951, KM menyelenggarakan kursus deteksi ranjau laut untuk dua anggota ALRI. Sementara itu, pada Juni 1951, kursus penggunaan Davis Vest mulai dilaksanakan. Davis Vest adalah sejenis rompi yang membantu penyesuaian daya apung bagi penyelam (dikenal juga sebagai *Buoyancy Compensatory Devices/BCD*) dan dikenakan terpisah dari helm/masker penyelaman. Menurut dokumen KM, kursus Davis Vest adalah salah satu kursus yang paling sering dilaksanakan.<sup>9</sup>

Selanjutnya, pada akhir Agustus 1951, kursus penyelaman mengalami perluasan cakupan peserta yang ditandai dengan penyelenggaraan kursus penyelam demolisi bagi anggota Korps Komando Operasi (KKO, di kemudian hari dikenal sebagai Korps Marinir).<sup>10</sup> Tidak selamanya kursus yang diselenggarakan secara langsung berkaitan dengan pertempuran bawah air, karena KM juga tercatat menyelenggarakan kursus las bawah air dan pembongkaran bangkai kapal. Kursus-kursus ini tercatat diselenggarakan hingga September 1952. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat perpanjangan durasi kerja sama antara ALRI dengan KM.

Secara keseluruhan, sejak Februari 1950 sampai akhir 1952, data pada Tabel 2 adalah daftar pelatihan penyelaman yang diselenggarakan oleh KM.

Selain tugas-tugas pelatihan, penyelam KM juga tercatat melaksanakan tugas-tugas bawah air lainnya seperti pengangkatan dan reparasi bawah air. Terkait pengangkatan, objek yang menjadi wilayah pekerjaannya mayoritas berkaitan dengan kapal-kapal KM yang karam atau peninggalan bahan peledak milik KM dari dekade 1940an.

Pada program-program pelatihan tersebut, hubungan antara penyelam KM dan penyelam ALRI bersifat kurang egalitarian sebab terjalin seperti guru dan murid. Namun, terdapat pula sebuah bagian pelatihan yang menuntut penyelam dari kedua negara yang sebelumnya bermusuhan ini dalam situasi yang lebih egaliter. Sejak Desember 1950, para penyelam KM menentukan bahwa mereka akan menggunakan bangkai kapal “Roggeveen” sebagai sarana Latihan para penyelam ALRI.<sup>11</sup>

Kapal Roggeveen adalah kapal armada niaga milik KPM yang diperbantukan kepada KM di sekitar serangan Jepang ke Hindia Belanda pada tahun 1942. Kapal ini sengaja ditenggelamkan oleh KM di tempat yang disebut “Kolam ME” (*ME Basin*) di daerah pangkalan Surabaya sebelum

---

8) *Ibid.*, fol. 59.

9) “Rapporten verrichtingen van het Marine...” *Ibid.*, fol. 72.

10) “Rapporten verrichtingen van het Marine...” *Ibid.*, fol. 132.

11) “Rapporten verrichtingen van het Marine...” *Ibid.*, fol. 28.

**Tabel 2.** Daftar pelatihan penyelaman yang diselenggarakan oleh KM

Waktu Pelaksanaan	Materi	Peserta	Instruktur KM
1/3/1950 – 1/5/1950 dan 1/8/1950 – 1/11/1950	Pendidikan Penyelaman Tingkat II	5 Anggota ALRI	Ltz.II. P. Van Pesch & Opp. Schip. C. Bimmel
12/2/1951 – 21/2/1951	Penanggulangan Ranjau Jepang	8 Anggota ALRI	Ltz.II. P. Van Pesch
1/3/1951- 21/3/1951	Demolisi	8 Anggota ALRI	Ltz.II. P. Van Pesch
9/4/1951 – 12/4/1951	Deteksi Ranjau untuk Perwira ALRI	3 Perwira ALRI	Ltz.III. W.J.A. Wilkens
22/8/1951-29/8/1951 dan 3/9/1951	Demolisi untuk Korps Komando Operasi (KKO)	15 Anggota KKO	Ltz.III. W.J.A. Wilkens
11/9/1951 dan 29/9/1951	Davis Vest untuk awak kapal permukaan	11 Anggota ALRI	Bootsman Capello
17/12/1951- 24/12/1951	Demolisi dan penanganan ranjau untuk dinas ranjau ALRI	6 Anggota ALRI	Ltz.III. W.J.A. Wilkens (praktik demolisi), Sgt.Torp. Van Den Herik (pengetahuan ranjau), dan Sgt.Torp. (teori demolisi)
23/1/1952-6/2/1952	Davis Vest	14 Anggota ALRI	Bootsman P. Capello dan Korp.Torp. R.W.Sebo
19/2/1952 – 3/3/1952	Praktik demolisi bagi lulusan kursus penanggulangan bahan peledak	2 Anggota ALRI	Ltz.III. VJA Wilkens dan Sgt. Torp. G.Erwich
18/2/1952	Ranjau Laut dan <i>Depth Charge</i> *	14 Anggota ALRI	Sgt.Torp. Van Den Herik dan Korp.Torpn. F.M.Petitjean
24/2/1952	Davis Vest	4 Anggota ALRI	Bootsman Capello
24/3/1952-5/4/1952	Demolisi dan ranjau	5 Anggota ALRI	Sgt.Torp. G.Erwich dan Sgt. Torp. Van Den Herik
19/5/1952-3/7/1952	Davis Vest	6 Anggota ALRI	Btsm. F. Capelle dan Korp. Torpm. F.M. Petitjean
6/5/1952	Demolisi	5 Anggota ALRI	Ltz.III. VJA Wilkens
18/8/1952	Penyelaman Dasar	3 Anggota ALRI	Ltz. Van Hoeven (teori) Kwmr. Feenstra (praktik)
26/8/1952	Kursus singkat ranjau dan torpedo untuk bintang ALRI	12 Anggota ALRI	Sgt.Torpm. Krijger dan Ltz.III. van Hoeven.
4/9/1952	Penyelaman Tingkat II	3 Anggota ALRI (satu <i>drop out</i> )	Ltz.III Van Hoeven (teori) Kwmr. Feenstra (praktik)

**Sumber:** Diolah dari “Rapporten verrichtingen van het Marine Duikbedrijf Oosten en Mijnen Opruim Dienst Oosten,” National Archief (NA), Den Haag, Inventaris van het archief van de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië, (1947) 1950-1954, inv.nr. 226. fol. 1-182.

\*Dept charge adalah sejenis bahan peledak bawah air dengan bentuk barel yang dijatukan oleh kapal permukaan agar mengenai kapal selam di bawahnya.

dihancurkan oleh pihak Jepang.<sup>12</sup> Namun, lebih dari sekadar pelatihan, para penyelam KM yang jumlah personilnya dikurangi dari waktu ke waktu memang membutuhkan mantan “murid-muridnya” dalam mengangkat kapal ini kembali ke permukaan.

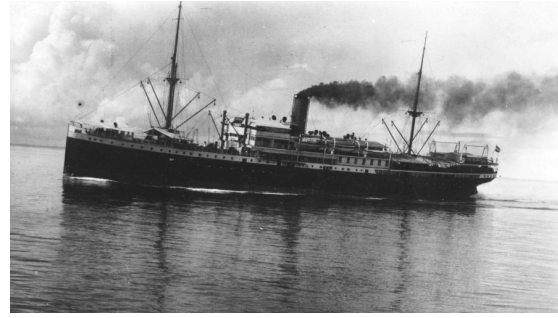
Pada Februari 1951, pekerjaan pengangkatan Roggeveen mulai dipersiapkan. Bersamaan dengan pekerjaan di bidang penyelaman lain, pada

12) “Dutch Warship Losses in the Dutch East Indies (December 7th, 1941 - March 8th, 1942)” [https://www.oocities.org/dutcheastindies/dutch\\_losses.html](https://www.oocities.org/dutcheastindies/dutch_losses.html)





**Figur 4.** Ilustrasi Davis Vest. **Sumber:** Dykkehistorisk Tidsskrift, Nr.56-19. Årgang 2015., p.11.



**Figur 5.** Kapal ss. Roggeveen milik KPM yang diperbantukan kepada KM. Kapal ini ditenggelamkan oleh pihak Belanda sebelum serangan Jepang terhadap Surabaya. **Sumber:**KITLV 142610.



**Figur 6.** Tiga tahapan persiapan penyelaman Kapal Roggeveen. **Sumber:** Nieuwe Courant, 1 Maret 1951.

Mei 1951, para penyelam KM dan ALRI baru dapat menempatkan terowongan penghisap (*suction tunnel*) untuk selanjutnya membebaskan kapal dari tali tambatan yang membelit. Setelah berlangsung selama tiga bulan, latihan bersama di Roggeveen diakhiri pada Agustus 1951 ketika penyelam dari kedua belah pihak berhasil menginstalasi dua pompa pemadam kebakaran di dek kapal tersebut (*Nieuwe Courant*, 01-03-1951).

Misi para penyelam KM dalam mendampingi dan melatih penyelam

ALRI diketahui berakhir pada tahun 1952. Namun, misi KM secara umum masih berlangsung sampai 30 Juni 1954, ditandai dengan upacara perpisahan *Instructie en Verzorgingsgroep* (Grup Pelatihan dan Pendukung) KM yang beranggotakan tujuh belas orang. Upacara ini langsung dipimpin oleh komandan misi KM yang kala itu dijabat oleh Commandeur Daane Bolier yang didampingi oleh Komandan Institut Angkatan Laut Mayor Huhnholz (*De Vrije Pers Ochtenbulletin*, 30-06-1954).

Dari pihak ALRI, upacara ini dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut kala itu Laksamana Muda Soebjakto dan perwira penghubung ALRI dengan KM, Kolonel Nazir. Dalam pidatonya, Laksamana Muda Soebjakto mengucapkan, "Nama Misi Militer Belanda, khususnya divisi angkatan laut, akan tercatat dengan penuh penghargaan dalam sejarah ALRI." (*De Vrije Pers Ochtenbulletin*, 30-06-1954).

Tahun 1952 juga dipilih oleh TNI-AL untuk menandai eksistensi awal dari Dinas Penyelamatan dan Pengangkatan (DPP) yang menginduk pada Dinas Ranjau Skuadron 10 ALRI. Sebab masih diawaki oleh sedikit anggota, DPP kala itu turut menjalankan tugas pelatihan penyelaman untuk kalangan ALRI. Pelatihan ini dianggap sebagai program pelatihan penyelaman pertama yang dilakukan oleh anggota ALRI. Selain itu, DPP juga diposisikan sebagai embrio dari pembentukan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) yang memilih 29 Mei 1961 (tanggal pembentukan KPBA, Komando Penyelamatan Bawah Air) sebagai tanggal lahirnya hingga hari ini.

## Kesimpulan

Pelaksanaan Konferensi Meja Bundar pada Agustus hingga Desember 1949 berhasil mempertegas pengakuan terhadap eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, delegasi Indonesia dan Belanda berkompromi atas beberapa persoalan. Salah satunya adalah memberikan peluang bagi Koninklijke Marine untuk tetap beroperasi secara sangat terbatas dan mengalihkan misi utamanya menjadi program pendampingan berdasarkan permintaan pihak Indonesia dalam upaya perkembangan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat.

Proses pendampingan yang tercipta sebagai hasil dari negosiasi menciptakan sebuah konteks historis di mana kedua angkatan laut saling berhubungan dan mendefinisikan berbagai hal. Hal yang disoroti oleh artikel ini adalah bagaimana kerja sama ini menegosiasikan bagaimana teknologi akan dimanfaatkan untuk kepentingan masing-masing pihak yang diasumsikan memiliki kepentingan yang cenderung diametral dalam konteks pasca-kolonial.

Di satu sisi, KM melihat ini sebagai proses transfer yang diamanatkan sebagai satu jalan memberikan Kerajaan Belanda suatu rencana keluar (*exit plan*) yang berorientasi pada pemeliharaan "nama baik," utamanya setelah

Belanda mengalami kegagalan dalam upayanya menjajah kembali Indonesia pada periode 1945-1949. Berlandaskan motivasi ini, pihak KM mengalami situasi yang sangat awam dialami oleh negara (ex)kolonial dalam menghadapi (ex)koloninya. Keluhan-keluhan mengenai ketidaksiapan teknologi dan sumber daya manusia mewarnai misi ini bersama dengan klaim bahwa perlakuan kepada anggota ALRI(S) telah setara dengan anggota KM.

Lebih lanjut, ketimpangan di dalam bidang teknologi ini kerap hadir di dalam laporan-laporan teknis yang bersifat saran kepada pimpinan ALRI(S) untuk masih mempercayakan beberapa tugas terkait penyelaman kepada KM karena ketidakcakapan penyelam ALRI(S). Sebagai sebuah konsekuensi, dalam beberapa aspek, pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat hanya terjadi di sebagian wilayah darat dan belum menyentuh teritori-teritori tertentu di dunia bawah air.

Di sisi lain, angkatan laut Indonesia yang kala itu baru saja berusia lima tahun memanfaatkan hasil kompromi tersebut secara tepat. Dalam memanfaatkan misi yang berusia relatif pendek tersebut, ALRI(S) mendorong sebesar-besarnya partisipasi dan sebanyak-banyaknya peserta untuk turut menimba ilmu dari para instruktur KM. Penerimaan atas kerja sama ini tidak serta merta membuat ALRI(S) berada di pihak yang pasif. Sebab, ALRI(S) terlebih dahulu membentuk sebuah dinas penyelaman sebelum KM memulai program asistensi pelatihan para penyelam Indonesia.

Keputusan ini menunjukkan bahwa betapa pun ALRI(S) menyepakati kerja sama di bidang penyelaman, pembentukan organisasi penyelam tetap berdasarkan pada inisiatif ALRI(S) selaku pihak yang sejak 1950 diakui berdaulat atas operasi di wilayah perairan Indonesia. Pada perkembangannya, ALRI(S) memanfaatkan semua program pelatihan di bidang penyelaman yang diselenggarakan oleh KM dan hanya membutuhkan dua tahun sampai memiliki dinas penyelaman sendiri yang kemudian menginduk di bawah dinas ranjau.

Melalui interaksi sebagaimana dijabarkan di atas, pembentukan dinas penyelam TNI-AL menyiratkan sebuah keberadaan “zona kontak” di mana “kebudayaan,” dalam ini penerimaan teknologi, antara negara (ex) kolonial dan (ex)koloni tidak hanya bertemu tetapi juga berselisih (*clash*) dan saling berkontestasi (*grapple*). Sebab interaksi ini terjadi tidak lama setelah pengakuan kedaulatan yang diawali oleh Konferensi Meja Bundar, maka proses pertentangan di dalam “zona kontak,” dalam banyak hal turut membentuk wacana eksistensi kekuasaan republik yang baru berdiri. Dengan kata lain, sejarah pembentukan satuan penyelam TNI-AL juga menunjukkan sebuah upaya menghadirkan negara Indonesia yang merdeka, tidak hanya di “tanah” tetapi juga di (bawah) “air.”

Sebagai penutup, artikel ini diharapkan dapat memicu banyak penelitian lanjut di bidang sejarah penyelaman Indonesia, baik dalam aspek

militer maupun aspek lainnya, terutama dengan mengeksplorasi sumber primer yang menawarkan sudut pandang Indonesia. Pada perkembangannya, sejarah penyelaman secara praktis dapat digunakan sebagai bahan pendidikan penyelam profesional dan rekreasi. Selain itu, studi yang komprehensif di bidang sejarah eksplorasi bawah air dapat pula melengkapi mozaik sejarah maritim Indonesia yang selama ini memusatkan perhatian pada permukaan air, namun kerap meninggalkan dunia bawah air yang jauh lebih luas dan penuh dengan misteri.

## Referensi

### Sumber Primer Tidak Dipublikasikan

Inventaris van het archief van de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië, (1947) 1950-1954, National Archief 2.13.73.

Inv.nr.226. "Rapporten verrichtingen van het Marine Duikbedrijf Oosten en Mijnen Opruim Dienst Oosten."

Inv.nr. 272. "Rapport betreffende de werkzaamheden van het Marine Duikbedrijf Oosten/Mijnen Opruimdienst Oosten, met geleidebrief."

Sumber Primer Dipublikasikan

Secretariat General of the Round Table Conference. "Round Table Conference Results as Accepted in the Second Plenary Meeting Held on 2 November 1949 in the "Ridderzaal" at the Hague." The Hague, 1950.

### Majalah dan Koran

*De Indische Courant*, 9-12-1932

*De Indische Courant*, 15-4-1932

*Soerabaijasch Handelsblad*, 06-03-1937

*Soerabaijasch Handelsblad*, 23-11-1937

*Nieuwe Courant*, 01-03-1951

*De Vrije Pers Ochtenbulletin*, 30-06-1954

*Dykkehistorisk Tidsskrift*, Nr.56-19. Årgang 2015

### Buku

Abduh, Muhamad, Zainal Abidin Hanif, Sarita Pawiloy, Masduki, and M. Noer Baso (1985). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Anderson, Warwick (2002). "Introduction: Postcolonial Technoscience." *Social Studies of Science* 32, no. 5/6: 643–58. <http://www.jstor.org/stable/3183050>.

Aviantara, Dodi, and Sidik Mukhlis (2012). *50 Tahun Kopaska : Spesialis Pertempuran Laut Khusus*. Jakarta: Komando Pasukan Katak.

Branfill-Cook, Roger (2014). *Torpedo: The Complete History of the World's Most Revolutionary Naval Weapon*. Havertown: Pen & Sword Books.

Conboy, Kenneth J. (2008). *Elite: The Special Forces of Indonesia 1950-2008*. 1st ed. Singapore: Equinox.

Direktorat Perawatan Personil TNI-AL, Sub Direktorat Sejarah (1987). *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut 1950-1959 Volume II*. Jakarta: Markas Besar TNI-AL.

Karkavitsas, Andreas (2021). *The Archeologist and Selected Sea Stories*. New York:

- Penguin Publishing Group.
- Kementerian Penerangan (1959). *Republik Indonesia Untuk Provinsi Sumatera Tengah*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Lemmers, Alan (2022). *Olke Arnoldus Uhlenbeck (1810-1888): van marineduiker tot vice-admiraal, een biografie*. Den Haag: Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
- Levie, Howard S. (1992). *Mine Warfare at Sea. Human Rights and Humanitarian Law* - Book Archive Pre-2000. Leiden Boston: Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004642287>.
- Markas Besar ABRI (1976). *30 [i.e. Tiga Puluh] Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*. Markas Besar ABRI.
- Marx, Robert F., and Robert F. Marx (1990). *The History of Underwater Exploration*. Dover ed. New York: Dover Publications.
- Pratt, Mary Louise (2006). *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation*. Repr. London: Routledge.
- Sather, Clifford (1997). *The Bajau Laut: Adaptation, History, and Fate in a Maritime Fishing Society of South-Eastern Sabah*. *South-East Asian Social Science Monographs*. Kuala Lumpur ; New York: Oxford University Press.
- Soleyman, J. Derek (2002). *Dari Pantai Biak Ke Pondok Dayung Dan Ujung: Menapaki Era Maritim*. Kebayoran Lama, Jakarta: Yayasan Goa Cantoka.
- Umar, Rika (1985). *Laksamana Mochamad Nazir, Karya Dan Pengabdianannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Warren, James Francis (2014). *The Sulu Zone, 1768 - 1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State*. 2. ed., Reprint. Singapore: Singapore University Press.

### Foto

Image Collection of NIMH (Nederlands Instituut voor Militaire Historie). Nomor: 2158\_044520, 2158\_001536, 2009-014-042\_007  
Southeast Asian & Caribbean Images Collection KITLV. Nomor: 142610

### Situs Web

"Dutch Warship Losses in the Dutch East Indies (December 7th, 1941 - March 8th, 1942)" [https://www.oocities.org/dutcheastindies/dutch\\_losses.html](https://www.oocities.org/dutcheastindies/dutch_losses.html)